

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1262).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 466).

Buku

- Arif Gosita, 1993, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Laura Clara Herena Tarigan, 2020, *Peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan*, (studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj), Univesitas Sumatera Utara, Medan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Tarsito, Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Masalah santunan korban kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Surjit Singh, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutomo Tjokronegoro, 1952, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman, Pustaka Rakyat, NV, Jakarta.*
- Y.A.T Ohoiwutun, 2016, *Imu Kedokteran forensic (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Majalah/Jurnal

- Amelia Fransiska Rompas, 2015, *Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Lex Et Societas, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III, Nomor. 1
- Bebby Yesica Doobora Sagai, 2017, *Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun*, Jurnal Lex Crimen.
- Besse Muqital Rijal Mentari, 2020, *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum.

Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, 2021, *Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Jember.

[https://ejournal.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM \(VER\) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN](https://ejournal.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN_VISUM_ET_REPERTUM_(VER)_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN) Destalia Christi 12 Februari 2016.

Michael Barama, 2011, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah.

Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).

Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011.

Website

<https://kbbi.web.id/autopsi> (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 21.50 WIB).

<https://kbbi.web.id/bunuh> (di akses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 20.40 WIB).

<https://kbbi.web.id/visum%20et%20repertum> (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.00 WIB).

[https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya](https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-Visum-et-Repertum:Prosedur,Jenis,danTahapannya) 21 agustus 2023, Tim Hukum Online.

Kairunisa Kirana, Visum et Repertum (VeR): Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa Pidana yang Membutuhkan VeR [Lengkap+Referensi], Warung Sains Teknologi, <https://warstek.com/visum-et-repertum/>, diakses pada tanggal 30 Nopember 2023 Pukul 21.40 WIB.